

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Abdurrahman. *Seluk Beluk Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Anwar, Jusuf. *Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Seri Pasar Modal 2*. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2006.
- Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin. *Aksi Korporasi, Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*. Cet. 1. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*. Cet. 3 Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kedua*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.6. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Cet.2. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet.1. Jakarta: PT. Intermasa, 2007.
- Koetin, E.A. *Pasar Modal Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Badan Pnerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Kedua*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. 3. Bandung: Binacipta, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Ha-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Surya, Indra. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2009.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.2. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath, dan Syahrir Ika. *Pengantar Dasar Pasar Modal*. Cet.1. Jakarta: Penerbit Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1984.
- Wardiah, Ernawati. *EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Cet.3. Jakarta: KawahMedia, 2009.

B. Tulisan Lain

- Budiarto, M. Arif. "Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham di BEJ Periode 1995-1996". Tesis Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hadiputranto, Sri Indrastuti dan Susanti Suhendro. "Transaksi Benturan Kepentingan: Suatu Perbandingan." Dalam Jurnal Hukum Pasar Modal. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2005.
- Karimsyah Lawfirm. "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)". <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>. Diunduh 10 Oktober 2009.
- Maarif, Samsul. "Rights Issue' CPRO Rugikan Publik". <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/03/25/93566/rights-issue-cpro-rugikan-publik/>. Diunduh 15 Mei 2009.

Susanto, Heri. "Kisruh Saham Central Proteinaprima Bapepam Diminta Usut Rights Issue CPRO". http://bisnis.vivanews.com/news/read/43231/bapepam_diminta_usut_rights_issue_cpro. Diunduh 15 Mei 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*. Peraturan Nomor VIII.D.1. Keputusan Nomor: Kep-37/PM/1996. Tanggal 17 Januari 1996.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Peraturan Nomor X.K.1. Keputusan Nomor: Kep-86/PM/1996. Tanggal 24 Januari 1996.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik*. Peraturan Nomor IX.J.1. Keputusan Nomor: Kep-13/PM/1997. Tanggal 30 April 1997.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.4. Keputusan Nomor: Kep-44/PM/1998. Tanggal 14 Agustus 1998.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.2. Keputusan Nomor: Kep-08/PM/2000. Tanggal 13 Maret 2000.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.3. Keputusan Nomor: 09/PM/2000. Tanggal 13 Maret 2000.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertent*. Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Nomor: 32/PM/2000. Tanggal 22 Agustus 2000.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX.D.1. Keputusan Nomor: 26/PM/2003. Tanggal 17 Juli 2003.

Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik*. Peraturan Nomor IX. J.1. Keputusan Nomor: Kep-179/BL/2008 . Tanggal 14 Mei 2008.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Peraturan Nomor IX. E.1. Keputusan Nomor: Kep-521/BL/2008 . Tanggal 12 Desember 2008.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*. Peraturan Nomor IX. E.1. Keputusan Nomor: Kep-412/BL/2009. Tanggal 25 Nopember 2009.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*. Peraturan Nomor IX. E.2. Keputusan Nomor: Kep-413/BL/2009 . Tanggal 25 Nopember 2009.

_____. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Peraturan Nomor IX. D.4. Keputusan Nomor: Kep-429/BL/2009 . Tanggal 9 Desember 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal*, PP No. 46 tahun 1995. LN No. 87 tahun 1995. TLN No. 3618.

_____. *Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*, PP No. 12 tahun 2004. LN No. 27 Tahun 2004. TLN No. 4372